



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PURWANDANI H PINILIHAN
2. Jabatan : KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
3. NHK : 807416

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.230.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
2. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, Rp. 280.000.000		
3. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, Rp. 380.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/84 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	265.950.000
1. MOBIL, TOYOTA REBORN V24 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 228.500.000		
2. MOTOR, HONDA TIGER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.700.000		
4. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	141.837.480
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---



Sub Total	Rp.	1.644.037.480
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.644.037.480

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.